

LKIP 2019

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022, Rencana Strategis 2017 -2022, Rencana Kerja (Renja) 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian target kinerja agar lebih baik di masa yang akan datang. Keselarasan indikator kinerja dengan program dan kegiatan menjadi hal utama dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Cimahi, Maret 2020

H Kepala Dinas Pangan dan Pertanian kota Cimahi



H
H. SUPENDI HERIYADI

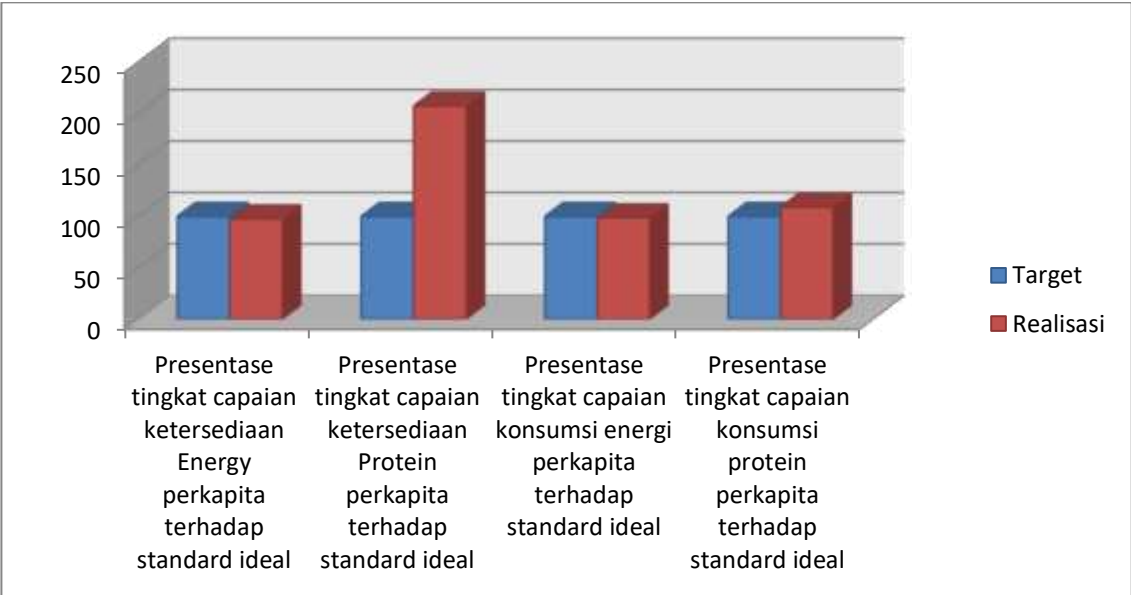
Pembina Utama Muda, IV/c

CNIP 19611202 198503 1 008

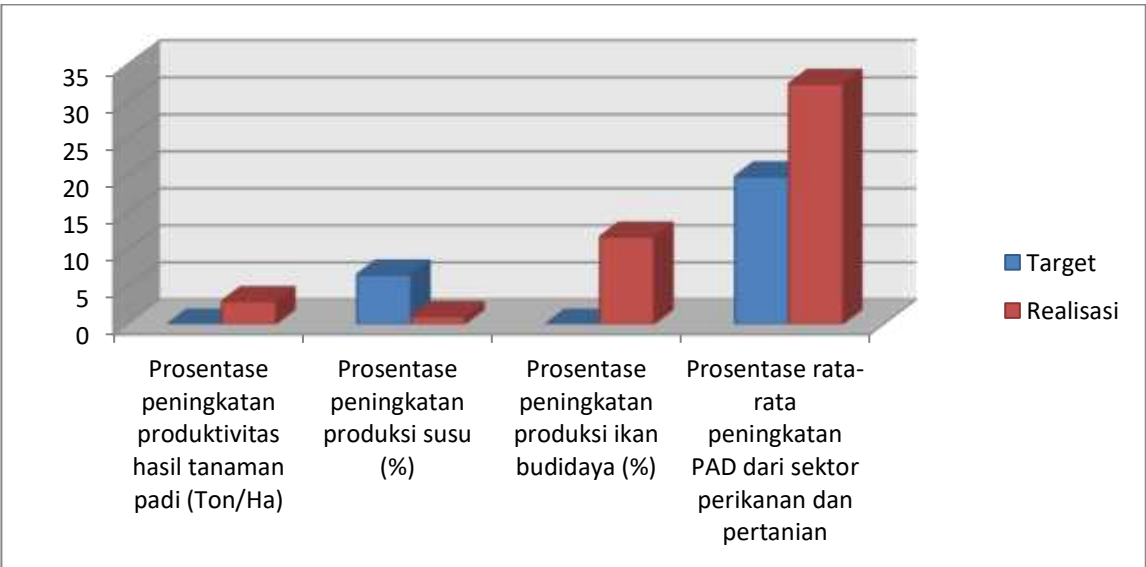
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2019 ini menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama Tahun 2019. Target Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019 terdiri atas 2 sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang realisasi dan capaiannya tampak pada grafik berikut:



Grafik Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 1



Grafik Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Capaian kinerja ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target kinerja pada akhir tahun Renstra untuk mengetahui perkembangannya sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum target kinerja dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan walaupun masih ada yang harus dievaluasi karena mengalami penurunan. Kendala dan permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja telah diupayakan alternative pemecahannya.

DAFTAR ISI

		Hal :
KATA PENGANTAR	(i)	
IKHTISAR EKSEKUTIF	(ii)	
DAFTAR ISI	(iv)	
DAFTAR TABEL	(v)	
DAFTAR GRAFIK	(vi)	
DAFTAR LAMPIRAN	(vii)	
 BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
	1.3 Aspek strategis	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	5
	2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi	5
	2.2 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	5
	2.4 Perjanjian Kinerja	7
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	8
	A. Capaian Kinerja	8
	3.1 Capaian Kinerja	8
	3.2 Analisis Capaian Kinerja	12
	3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
	3.4 Realisasi Anggaran	26
BAB IV	PENUTUP	31
	4.1 Kesimpulan	31
	4.2 Kendala dan Hambatan	32
	4.3 Upaya Tindak Lanjut	32

DAFTAR TABEL

	Hal :
Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dispangtan Kota Cimahi.....	8
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispangtan	9
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran strategis Tahun 2019 dengan Akhir Tahun renstra	11
Tabel 3.4 Situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019.....	14
Tabel 3.5 Perbandingan Prosentase Ketersediaan Energy dan Protein Terhadap Standar Ideal di kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional.....	14
Tabel 3.6 Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata Kota Cimahi Tahun 2019	16
Tabel 3.7 Perbandingan Prosentase Konsumsi Energi dan Protein terhadap Standar Ideal di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional	16
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel 3.9 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	23
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran	26

DAFTAR GRAFIK

		Hal :
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Indikator kinerja sasaran strategis 1...	8
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Indikator kinerja sasaran strategis 1...	
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Prosentase Ketersediaan Energi Dan Protein terhadap Standar Ideal	11
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Prosentase konsumsi Energi Dan Protein terhadap Standar Ideal	12
Grafik 3.5	Perbandingan Capaian Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman Padi, produksi Susu, Produksi Ikan Budidaya, dan Rata-rata PAD dari Sektor Pertanian dan perikanan Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 2017	12
Grafik 3.6	Konsumsi Energi Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi	17
Grafik 3.7	Konsumsi Protein Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi	17

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 3 Rencana Kerja Tahunan 2019 dan 2020
- Lampiran 4 Rencana Aksi Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 5 Monitoring dan Evaluasi Rencana aksi Tahun 2019
Semester 1 dan Semester 2
- Lampiran 6 SK Tim Penyusunan LKIP
- Lampiran 7 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- Lampiran 8 Rencana Kerja Tahun 2019 dan 2020
- Lampiran 9 Indikator Kinerja Individu
- Lampiran 10 Hasil Reviu Renstra dan IKU Perangkat Daerah Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi maka terbentuklah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi, yaitu Bidang Pertanian.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara mernadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2019 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, selama kurun waktu satu tahun di Tahun Anggaran 2019

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi ini adalah untuk menyampaikan/melaporkan hasil capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2019. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian serta sebagai umpan balik untuk perbaikan yang berkesinambungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325) Kedudukan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pangan dan pertanian serta kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan
- 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan tugas bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan
- 4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Dinas Pangan dan Pertanian terdiri atas 2 (dua) bidang, sekretariat, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) – Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas). Adapun bidang-bidang tersebut beserta fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ketahanan Pangan

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang ketahanan pangan.
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pertanian dan Perikanan

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian, peternakan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. UPT Balai Benih Ikan Tawar (BBIAT)

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas balai benih ikan air tawar;

4. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)

- Perencanaan operasional kegiatan pusat kesehatan hewan dan laboratorium;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan

5. Sekretariat

Fungsi :

- Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Aspek Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi memiliki tugas urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan pangan dan urusan pilihan yaitu pertanian.

Terdapat 2 (dua) isu strategis di Kota Cimahi yang menjadi tugas yang diemban oleh Dinas Pangan dan Pertanian yaitu:

1. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
2. Masih rendahnya produksi pertanian daerah

Oleh karena itu Dinas Pangan dan Pertanian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu

1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui Peningkatan ketersediaan dan akses pangan penduduk.
2. Meningkatkan produksi pertanian untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Berdasarkan isu strategis tersebut Dinas Pangan dan Pertanian telah menetapkan 2 (dua) sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan.
2. Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah **“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis Dan Berbudaya”**

Upaya mewujudkan visi Kota Cimahi akan dicapai melalui misi Kota Cimahi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas pangan dan Pertanian berkaitan dengan misi 3, yaitu: *Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.*

2.2 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian merupakan perencanaan jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang

mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019 berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018. Perbedaan ini dikarenakan ada pertimbangan untuk dilakukan perubahan IKU berdasarkan review dari Inspektorat Kota Cimahi dan juga pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. IKU tahun 2018 dinilai terlalu sempit tidak menaungi program dan kegiatan di bawahnya yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

IKU 2018 Dinas Pangan dan Pertanian (sebelum perubahan) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pangan penduduk, dengan indikator PPH Konsumsi
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman Padi, dengan indikator Produktivitas Hasil Tanaman Padi (Ton/Ha).

IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 2019 merupakan IKU hasil review dari IKU 2018 dengan Berita Acara Hasil Review Renstra dan IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor : 027/1677/Sekre. IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 2019 juga sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi 2019 – 2022. Adapun IKU 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan janji Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi kepada Kepala Daerah/Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja tahun 2019 (murni dan perubahan) telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2019 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)	Ketersediaan Energy : 100 % Ketersediaan Protein : 100 %
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)	Konsumsi Energi: 100 % Konsumsi Protein: 100 %
2.	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)	0%
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)	6.67 %
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)	0
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	19,93%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mulai tahun 2019 ini Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator nya, tampak pada table 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dispangtan Kota Cimahi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian

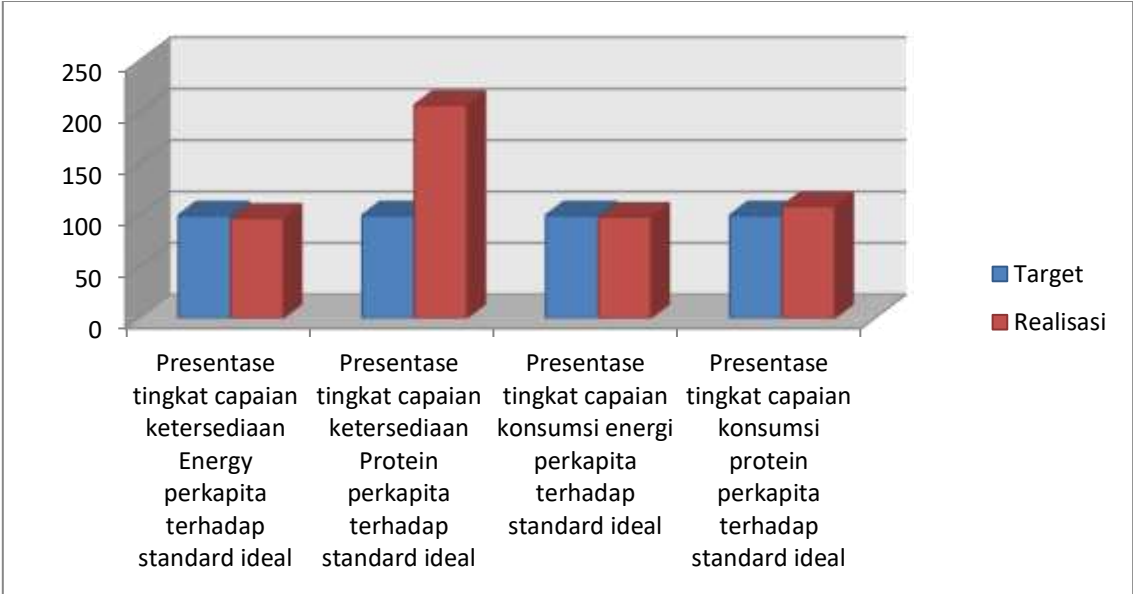
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2019 berdasarkan sasaran strategisnya nya tampak pada table 3.2 berikut :

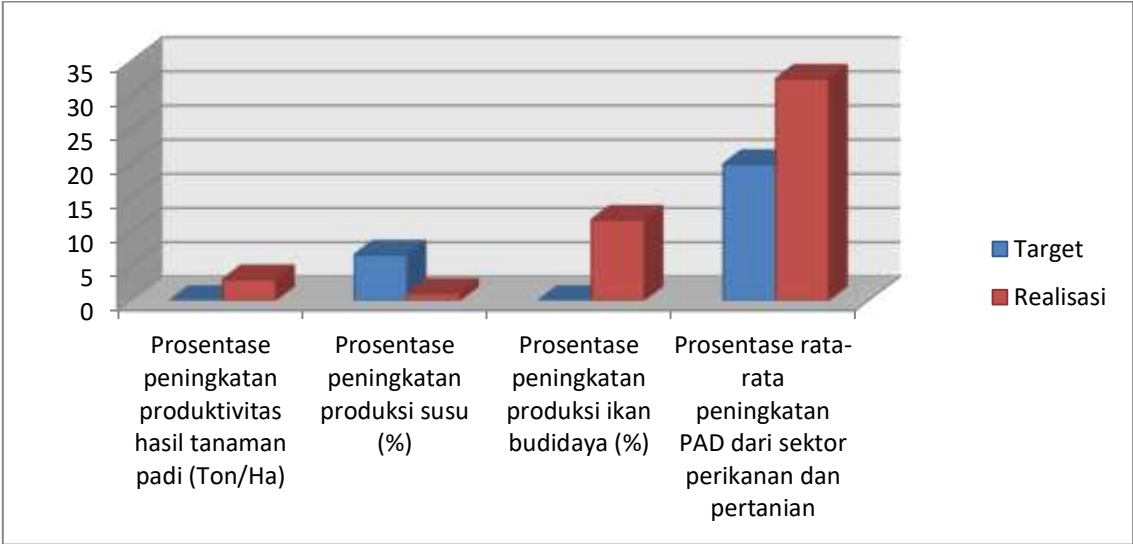
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispangtan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Ket
				Target	Realisasi		
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Energy : 100 Protein : 100	Energy: 97.6 Protein: 207.3	97.6 207.3	
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Energi: 100 Protein: 100	Energi: 98,7 Protein: 108,92	98,7 108,92	
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)	%	0	3,07	3,07	
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)	%	6.67	1,04	15,59	
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)	%	0	11,78	11,78	
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	%	19,93	32,43%	162,72	

Masing-masing capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dibuat grafik sebagai berikut:



Grafik 3.1 Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 1



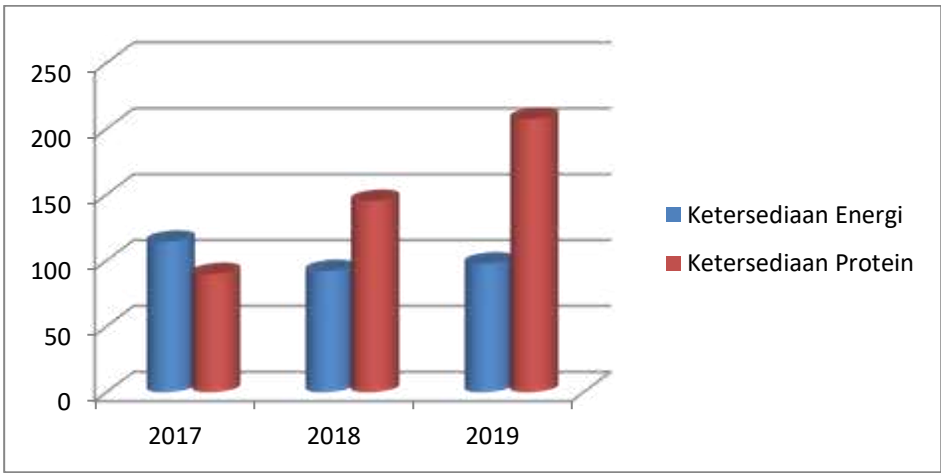
Grafik 3.2 Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra tampak pada Tabel 3.3 berikut:

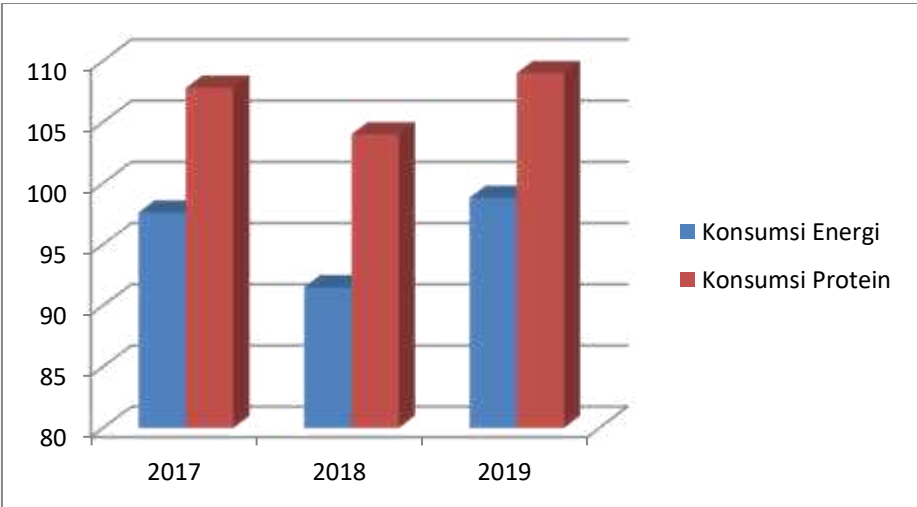
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 dengan Tahun-tahun sebelumnya dan dengan Target Akhir Tahun renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Target Renstra Tahun 2022	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Renstra Tahun 2022
				2016	2017	2018	2019		
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	N/A	Energy: 114,1% Protein: 89,6 %	Energy: 91,9 % Protein: 145,1%	Energy: 97,6 % Protein: 207,3 %	Energy : 100 Protein : 100	Energy : 100 Protein : 100
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	N/A	Energy: 97,6 % Protein: 107,8 %	Energy: 91,5 % Protein: 104 %	Energy: 98,8 % Protein: 109,0 %	Energy : 100 Protein : 100	Energy : 100 Protein : 100
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (%)	%	0	0	2,62	2,62	154	170
		b. Prosentase peningkatan produksi susu	%	N/A	0	9,73	1,04	26,67	3,9
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya	%	N/A	0	9,5	11,78	5	235,6
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	%	-	-	43,96	32,43	7,5	432,4

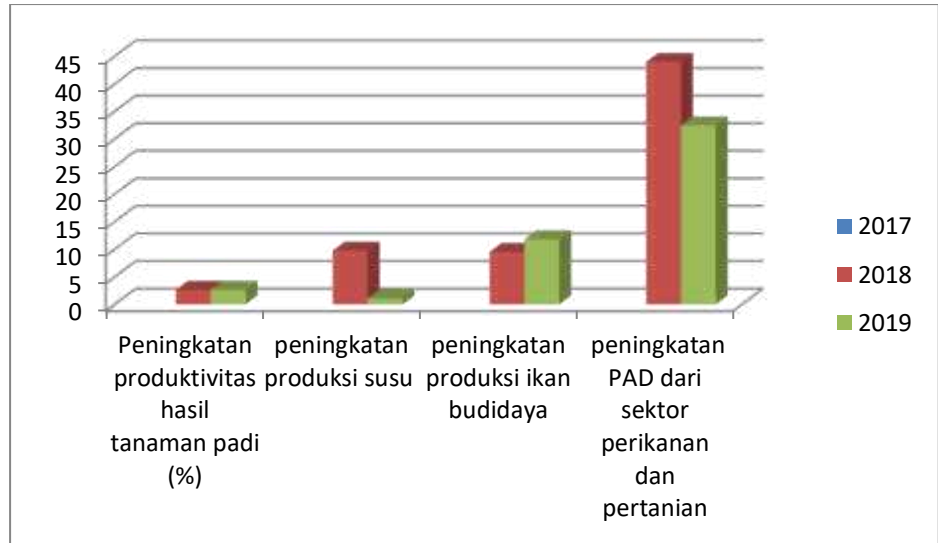
Grafik perbandingan capaian tiap-tiap Indikator Kinerja di atas tampak di bawah ini.



Grafik 3.3 Perbandingan capaian Prosentase Ketersediaan Energy dan Protein terhadap standar Ideal



Grafik 3.4 Perbandingan capaian Prosentase konsumsi Energy dan Protein terhadap standar **Ideal**



Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Peningkatan Produktivitas Hasil tanaman Padi, Produksi Susu, Produksi Ikan budidaya, dan rata-rata PAD dari Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 2017

3.2. Analisis Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2019

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Ketersediaan Energi: 100%	Ketersediaan Energi: 97,6 %	97,6%
			Ketersediaan Protein : 100%	Ketersediaan Protein : 207,3%	207,3%
2	Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Konsumsi Energi : 100 %	Konsumsi Energi : 98,7 %	98,7%
			Konsumsi Protein : 100%	Konsumsi Protein : 108,92%	108,92%

Penjelasan Sasaran Strategis 1 : **Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan**

Kuantitas ketersediaan pangan dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis kemandirian pangan sebuah daerah (Kabupaten/Kota). Kemandirian pangan adalah kemampuan wilayah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan suatu daerah dapat dianalisis dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif yang digunakan adalah tingkat kecukupan energy dan protein, sedangkan indikator kualitatif atau keragaman pangan yang tersedia adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu, Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis maupun social. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan. Kualitas makanan menunjukkan adanya zat gizi yang diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya terhadap satu dan lainnya. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Tingkat konsumsi individu dapat mempengaruhi status gizinya.

Status gizi yang baik yang ingin diwujudkan dalam pembangunan ketahanan pangan adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang sehat dan berkualitas, yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya. Status gizi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemampuan menyediakan makanan di tingkat keluarga dan adanya penyakit terutama penyakit menular. Kedua faktor ini berhubungan dengan pendapatan, pelayanan kesehatan, pengetahuan dan pola asuh yang diterapkan keluarga.

Sasaran Sinergis ini memiliki dua indikator yaitu :

1. **Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal.** Standar ideal yang dimaksud adalah angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 menganjurkan konsumsi energy dan protein penduduk masing-masing adalah 2.400 kkal/kap/hari dan 63 gram/kap/hari (Laporan Akhir Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Cimahi, 2019, kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Prosentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal dapat dilihat berdasarkan Situasi Ketersediaan Pangan kota Cimahi Tahun 2019 hasil kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting).

Adapun Situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019 tampak pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2019

Kelompok Pangan	Gram/Kap/ Hari	Energi		Protein		Skor PPH
		Kkal/Kap/ hari	% AKE	Kkal/Kap/ hari	% AKP	
Padi-padian	413,8	1450	60,4	36,6	58,1	25
Umbi-umbian	sni	38	1,6	0,2	0,4	0,8
Pangan hewani	324	284	11,9	19,4	30,7	23,7
Minyak dan lemak	32	280	11,7	0,2	0,4	5
Buah/biji berminyak	1,4	3	0,1	0	0	0,1
Kacang-kacangan	23	86	3,6	8,9	14,1	7,2
Gula	15,4	57	2,4	0,1	0,1	1,2
Sayur dan buah	497	145	6	65,2	103,5	30
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Total	1.334	2.342	97,6	130,6	207,3	92,9

Berdasarkan table 3.4 di atas tampak bahwa ketersediaan energy di Kota Cimahi untuk tahun 2019 adalah **2.342 kkal/kap/hari atau setara dengan 97,6 %** dari standar ideal yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Sedangkan angka ketersediaan protein total adalah **130,6 gram/kap/hari atau setara dengan 207,3 % dari standar ideal**, yaitu Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 63 gram/kap/hari. Dengan demikian jika dilihat dari segi kuantitatif, ketersediaan pangan di wilayah Kota Cimahi sudah cukup (90 – 110 % dari standar ideal (AKE). Pada aspek kualitatif, penyediaan pangan di Kota Cimahi belum optimal. Penyediaan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula belum memenuhi standar ideal. Adapun kelompok pangan yang telah mencapai ketersediaan ideal ialah kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah.

Perbandingan dengan Capaian Propinsi Jabar dan Nasional

Prosentase ketersediaan energy dan protein Kota Cimahi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat dan Nasional tampak pada table 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Prosentase Ketersediaan Energi dan Protein terhadap standar Ideal di Kota cimahi, Propinsi Jawa barat, dan Nasional

	Prosentase Ketersediaan energy terhadap standard Ideal (AKE)	Prosentase Ketersediaan Protein Terhadap Standar Ideal (AKP)
Kota Cimahi	97,6 %	207,3%
Prop. Jawa barat	137,75 %	95,55 %
Nasional	160,92 % (2017)	147,22 %

Berdasarkan table 3.5 tampak bahwa prosentase ketersediaan energy di Kota Cimahi masih dibawah Propinsi Jawa Barat dan Naional. Namun untuk prosentase ketersediaan proteinnya di atas Propinsi Jawa Barat dan juga nasional.

Kendala :

Kota Cimahi merupakan wilayah perkotaan dengan lahan pertanian terbatas. Produksi pangan di Kota Cimahi baru mencukupi kebutuhan pangan penduduknya sebesar 2% atau setara dengan 49 kkal/kapita/hari. Sementara itu, ketersediaan protein juga masih jauh dari angka kecukupan protein, yaitu sebesar 2.2 gram/kapita/hari atau setara dengan 3.5% AKP. Pangan yang masih dapat diproduksi dalam jumlah terbatas untuk kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah. Kelompok pangan utama penyumbang ketersediaan energi adalah kelompok padi-padian (1.0%) sedangkan protein adalah pangan hewani (2.2%) (Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kota Cimahi, 2019, Kerjasama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar berasal dari luar wilayah.

Solusi :

Untuk menjamin ketersediaan pangan di Kota Cimahi, berbagai upaya dilakukan diantaranya :

2. terus mengupayakan untuk meningkatkan produksi dari sektor pertanian, melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
3. Menjamin kelancaran distribusi dan rantai pasokan dengan membentuk Toko Tani Indonesia Center. (TTIC)
4. Pemantauan harga untuk stabilisasi harga pangan di pasaran.

2. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal.

Standar ideal yang dimaksud adalah angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 menganjurkan konsumsi energy dan protein penduduk masing-masing adalah 2.150 kkal/kap/hari dan 57 gram/kap/hari (Laporan Akhir Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Cimahi, 2019, kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Prosentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal dapat dilihat berdasarkan Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata kota Cimahi Tahun 2019 hasil kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Adapun Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata Kota Cimahi Tahun 2019 tampak pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6 Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata Kota Cimahi Tahun 2019

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/ Hari	Kkal/Kap/ hari	% AKE	Kkal/Kap/ hari	% AKP	Skor PPH
1	Padi-padian	301,5	1.288	59,9	29,4	51,7	25
2	Umbi-umbian	35,2	35	1,6	0,4	0,7	0,8
3	Pangan hewani	121,4	266	12,4	21,1	37,1	24
4	Minyak dan lemak	28,2	250	11,6	0,1	0,2	5
5	Buah/biji berminyak	1,8	11	0,5	0,3	0,4	0,2
6	Kacang-kacangan	27,3	59	2,8	6,3	11,1	5,5
7	Gula	12,8	51	2,4	0,2	0,3	1,2
8	Sayur dan buah	216,3	95	4,4	3	5,3	22
9	Lain-lain	100,8	67	3,1	1,2	2,2	0
Total			2.123	98,8	62,1	109	83,8

Berdasarkan table 3.6 di atas tampak bahwa jumlah rata-rata konsumsi enegi dan protein penduduk Kota Cimahi sebesar 2.123 kkal/kap/hari atau setara dengan 98,8 % dari standar ideal (AKE). Dari data tersebut diketahui bahwa rata-rata kuantitas konsumsi pangan Kota Cimahi tahun 2019 berada dalam kategori tahan pangan karena jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energy ideal (90 – 119,9 % AKE). Akan tetapi jika dilihat per kelompok pangan maka dapat dilihat terdapat beberapa kelompok pangan yang konsumsinya masih belum sesuai dengan anjuran ideal. Konsumsi energy kelompok padi-padian sebesar 1.288 kkal/kap/hari (59,9 %). Jumlah ini tergolong berlebih dari standar yaitu 1.075 kkal/kap/hari (50 % AKE). Kelompok pangan padi-padian terdiri dari beras, jagung, dan terigu. Penduduk Cimahi harus menurunkan konsumsi padi-padian, terutama beras dan terigu karena sudah berlebih. Di sisi lain, konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya yaitu umbi-umbian tergolong rendah, yaitu 35 kkal/kap/hari dari standar 129 kkal/kap/hari. Berbeda dengan konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak yang berlebih dan harus diturunkan, konsumsi kelompok pangan hewani yang juga tergolong berlebih (266 kkal/kap/hari) dari standar 258 kkal/kap/hari direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. Adapun konsumsi pangan sumber protein nabati masih kurang, yakni baru dikonsumsi setengah dari anjuran (59 kkal/kap/haari dari standar 107,5 kkal/kap/hari). Berbeda halnya dengan konsumsi buah/biji berminyak, gula serta sayur dan buah. Konsumsi buah/biji berminyak hanya 11 kkal/kap/hari, padahal anjurannya sebesar 65 kkal/kap/hari dari anjuran sebesar 108 kkal/kap/hari. Adapun konsumsi sayur dan buah baru sebesar 74% dari ideal yakni 95 kkal/kap/hari dari anjuran ideal sebesar 129 kkal/kap/hari. Dengan demikian, konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayur dan buah sebaiknya ditingkatkan untuk dapat mencapai masyarakat yang sehat dan produktif.

Rata-rata konsumsi protein sebesar 62,1 gram/kap/hariatau setara dengan 109,0 standar ideal (Angka Kecukupan Protein =AKP). Kontribusi tertinggi protein berasal dari kelompok padi-padian (51,7%), diikuti oleh kelompok pangand hewani (37,1%) dan kacang-kacangan (11,1%). Konsumsi padi-padian yang berlebih turut menyumbangkan kontribusi protein yang cukup tinggi. Namun mutu protein padi-

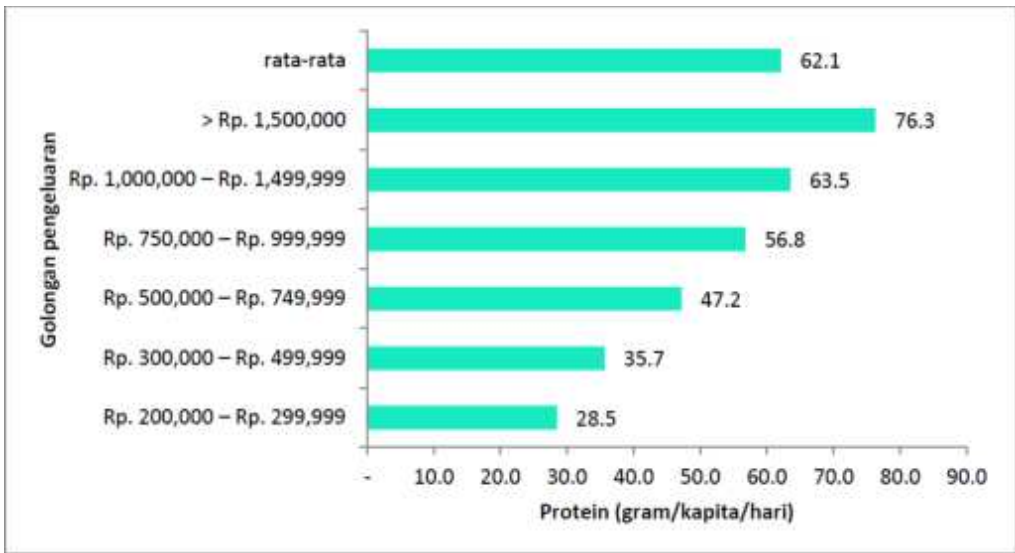
padian tidak setinggi mutu protein kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan sehingga peningkatan konsumsi pangan sumber protein hewani dan nabati tetap diperlukan.

Kendala :

Tingkat konsumsi pangan penduduk dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan juga tergantung kepada pemahaman masyarakat itu sendiri tentang pentingnya asupan makanan yang beragam, bergizi, sehat, aman, dan halal. Berdasarkan data konsumsi energy dan protein penduduk Kota Cimahi berdasarkan golongan pengeluaran hasil survey Sosial Ekonomi nasional (Susenas) Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Barat, menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran maka semakin tinggi konsumsi energy dan proteinnya. Grafik hubungan antara Konsumsi energy penduduk dengan golongan pengeluaran di kota Cimahi tampak pada Gambar 3.1. Sedangkan grafik hubungan antara Konsumsi protein penduduk dengan golongan pengeluaran di kota Cimahi tampak pada Gambar 3.2



Grafik 3.6 Konsumsi Energy Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi



Grafik 3.7 Konsumsi Protein Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi

Dari gambar tersebut terlihat bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran maka semakin tinggi konsumsi energi dan proteinnya. Penduduk yang termasuk pada golongan pengeluaran Rp. 750,000 – Rp. 1,499,000/bulan memiliki konsumsi energi ideal yaitu $\pm$ 90-110 % dari 2,150 kkal/kapita/hari. Adapun konsumsi energi golongan pengeluaran > Rp. 1,500,000/bulan ke atas tergolong berlebih karena lebih tinggi dari 110% AKE. Sementara itu, konsumsi energi golongan pengeluaran < Rp. 750,000/bulan tergolong rendah karena di bawah 90% AKE. Lebih lanjut, penduduk dengan golongan pengeluaran dibawah Rp. 500,000/bulan tergolong penduduk rawan pangan dari sisi konsumsi.

Seperti halnya konsumsi energi, konsumsi protein penduduk Kota Cimahi juga cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran/bulan (Gambar 3.2). Konsumsi protein penduduk yang berada pada golongan pengeluaran > Rp. 1,000,000/bulan tergolong cukup bahkan berlebih. Namun, konsumsi protein penduduk yang berada pada golongan pengeluaran < Rp. 1,000,000/bulan masih kurang (< 57 g/kapita/hari). Peningkatan konsumsi protein juga dimungkinkan karena perubahan persepsi masyarakat akan pentingnya konsumsi protein untuk kesehatan. Perubahan persepsi ini sebagai hasil dari sosiaalisasi pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan berimbang di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan.

Solusi :

Mengefektifkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung konsumsi pangan yang berkualitas melalui kegiatan seperti:

- 1. Penyuluhan sumber pangan alternative
- 2. Sosialisasi dan lomba menu B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman)
- 3. Sosialisasi gemar makan ikan
- 4. Promosi P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) di tingkat kelurahan dan kecamatan

Perbandingan dengan Capaian Propinsi Jabar dan Nasional

Prosentase konsumsi energy dan protein Kota Cimahi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat dan Nasional tampak pada table 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Prosentase Konsumsi energy dan Protein terhadap Standar Ideal di Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat. dan Nasional

	Prosentase Konsumsi energy terhadap standard Ideal (AKE)	Prosentase Konsumsi Protein Terhadap Standar Ideal (AKP)
Kota Cimahi	98,7 %	108,92 %
Prop. Jawa barat	91,21 %	105,6 %
Nasional	98,98 %	111,04 %

Berdasarkan table 3.7 tampak bahwa prosentase konsumsi energy di Kota Cimahi di atas capaian Propinsi Jawa Barat, namun masih dibawah capaian nasional. Namun capaian prosentase konsumsi protein Kota Cimahi di atas capaian Propinsi Jawa Barat dan juga Nasional. Hal ini dikarenakan sudah ada perubahan persepsi masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya konsumsi protein sebagai dampak dari upaya sosialisasi

pentingnya konsumsi yang beragam dan berimbang yang dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	%	0 % (Tetap)	2,62%	2,62 %
2	Prosentase peningkatan produksi susu	%	6.67 %	1,04 %	15,59 %
3	Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya	%	0 % (Tetap)	11,78 %	11,78 %
4	Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	%	19,93 %	32,43%	162,72%

Penjelasan Sasaran Sinergis 2 : Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

Salah satu isu strategis Kota cimahi adalah Masih Rendahnya Produksi Pertanian Daerah. Oleh karena itu salah satu sasaran strategisnya adalah Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sasaran Strategis ini memiliki 4 indikator, yaitu :

1. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi.

Produktivitas padi adalah jumlah produksi hasil tanaman pagi dibagi dengan luas lahan yang ditanami. Peningkatan prosentase produktivitas hasil tanaman padi dihitung berdasarkan peningkatan produktivitas hasil tanaman padi pada tahun 2019 terhadap produktivitas hasil tanaman padi pada awal Rencana Strategis, yaitu Tahun 2017. Produktivitas hasil tanaman padi pada tahun 2017 sebesar 6,5 ton/Ha. Berhubung banyak terjadinya ahli fungsi lahan, maka target peningkatan produktivitas hasil tanaman padi pada tahun 2019 adalah 0 (nol), artinya diharapkan pada tahun 2019 minimal produktivitas hasil tanaman padi tetap yaitu 6,5 ton/Ha. Ternyata capaian kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2019 produktivitas hasil tanaman padi sebesar 6,67 ton/Ha. Dengan demikian terjadi peningkatan prosentase produktivitas hasil tanaman padi terhadap capaian pada tahun 2017 sebesar 0,17 ton/Ha. Artinya pada tahun 2019 terjadi peningkatan prosentase produktivitas hasil tanaman padi sebesar 2,62 %. Peningkatan produktivitas hasil tanaman padi ini didukung oleh keberhasilan upaya yang dilakukan dengan penerapan Sistem Budidaya Pengelolaan Tanaman Terpadu yang mencakup penerapan teknologi budidaya tanam padi, misalnya dengan sistem jajar legowo, penggunaan varietas unggul baru (VUB), penggunaan bibit muda yaitu usia tanam tidak lebih dari 3 (tiga)

minggu, penerapan pupuk berimbang dan Pengendalian Hama terpadu, dan penanganan pasca panen yang tepat.

Kendala :

Luas lahan pertanian di Kota Cimahi terus mengalami pengurangan akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik (BPS). Lahan sawah Kota cimahi tahun 2019 adalah 137,14 Ha. Berkurangnya luas lahan pesawahan ini berdampak kepada produksi dan produktivitas hasil tanaman padi.

Solusi :

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman padi, diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 15,35 Ha.
2. Intensifikasi pertanian (pengolahan tanah yang baik, penggunaan varietas unggul baru, pemupukan yang berimbang, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman
3. Penerapan teknologi tepat guna (vertikultur, hidroponik, hidroponik, tabulapot, padi polybag)
4. Pengembangan sentra (sentra toge, sentra jamur dan sentra susu cipageran).
5. Uji varietas tanaman

2. Prosentase peningkatan produksi susu

Pada awal tahun Rencana Strategis (Renstra) yaitu tahun 2017 produksi susu mencapai 750.000 liter. Pada tahun 2019 ditargetkan terjadi peningkatan produksi susu sebesar 6,67 % terhadap capaian pada awal tahun Renstra, yaitu 800.000 liter. Namun ternyata capaian kinerja menunjukkan bahwa realisasinya produksi susu hanya mengalami peningkatan sebesar 1,04 % yaitu sebanyak 757,857 liter. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang mana produksinya sebesar 823.000 liter, maka di tahun 2019 ini terjadi penurunan produksi susu. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan populasi sapi perah sebagai dampak dari kemarau panjang yang terjadi di sepanjang tahun 2019. Penurunan populasi ini dipicu oleh penurunan pakan ternak berupa rumput.

Kendala :

Kendala Internal diantaranya Keterbatasan Sumber Daya Manusia, sementara Seksi Peternakanmewadahi kegiatan statistik peternakan, kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan produksi peternakan sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal. Adapun kendala eksternal diantaranya para peternak kurangnya menyadari pentingnya teknologi tepat guna yang bisa diterapkan untuk peternakan.

Solusi :

Merekrut tenaga Harian Lepas, melaksanakan bimtek teknologi tepat guna bidang peternakan.

3. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya

Produksi perikanan budidaya pada tahun awal Renstra, yaitu 2017 adalah 300 ton. Target prosentase peningkatan pada Renstra untuk tahun 2019 sama dengan target yang ditetapkan di tahun 2018 yaitu 0%, artinya targetnya masih 300 ton. Namun ternyata realisasi capaian nya menunjukkan terjadi peningkatan. Prosentase peningkatannya untuk tahun 2019 ini mencapai 11,78 %. Realnya pada tahun 2019 tercapai target sebanyak 335,35 ton. Capaian ini didukung penerapan teknologi tepat guna oleh para pembudi daya ikan. Semula cara pembudidayaan ikan menggunakan cara konvensional kemudian melalui pembinaan diterapkan cara semi intensif dan intensif, contohnya penerapan bioflok atau padat tebar tinggi).

Kendala :

1. Pelatihan tidak sesuai kebutuhan
2. Kurangnya kesadaran Pembudidaya ikan / nelayan untuk berkelompok
3. Ada anggapan pembudidaya / nelayan bahwa teknologi itu mahal dan enggan berinovasi
4. Bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun jenis
5. Berkurangnya lahan budidaya

Solusi :

1. Pendekatan Bottom - up
2. Pengenalan inovasi teknologi baru
3. Pendekatan Bottom – Up, memberi pengertian bahwa bantuan pemerintah merupakan stimulan
4. Intensifikasi usaha dan inovasi padat tebar

4. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian memiliki 2 (dua) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari UPT Pusat Kesehatan Hewan dan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. PAD dari Puskesmas melalui Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah di Puskesmas yang dimulai tahun 2017. Sedangkan PAD dari UPT BBIAT melalui Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. Target prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian untuk tahun 2019 adalah sebesar 19,93 % dari tahun sebelumnya, yaitu

tahun 2018. Realisasinya cukup bagus yaitu terjadi peningkatan sebesar 32,43% dari Puskesmas dan 29.62% dari BBIAT. Sehingga prosentase rata-rata peningkatan dari tahun sebelumnya adalah 19,93 %. Realisasi nominalnya dari UPT Puskesmas adalah 212.745.000 (96,70 % terhadap target), sedangkan dari UPT BBIAT sebesar 42.568.000 (106,10 % terhadap target).

Kendala :

1. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan di UPT Puskesmas
2. Terbatasnya Sumber Daya manusia (khususnya dokter hewan) di Puskesmas dan tenaga ahli perikanan di UPT BBIAT

Solusi :

1. Memberdayakan fasilitas yang ada sambil mengupayakan pengadaan sarana prasarana melalui program bantuan propinsi.
2. Merekrut Tenaga Harian Lepas (THL) dokter hewan dan mengikutsertakan SDM di UPT BBIAT dalam pelatihan-pelatihan.

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja Sasaran Strategis pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	Prosentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	Ketersediaan Energi: 100%	Ketersediaan Energi: 97,6 %	97,6%	-
		Ketersediaan Protein : 100%	Ketersediaan Protein : 207,3%	207,3%	107,3 %
2	Prosentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	Konsumsi Energi : 100 %	Konsumsi Energi : 98,7 %	98,7%	-
		Konsumsi Protein : 100%	Konsumsi Protein : 108,92%	108,92%	8,92 %
3	Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	0 % (Tetap)	2,62%	2,62 %	-
4	Prosentase peningkatan produksi susu	6.67 %	1,04 %	15,59 %	-
5	Prosentase peningkatan produksi	0 % (Tetap)	11,78 %	11,78 %	-

	ikan budidaya				
6	Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	19,93 %	32,43%	162,72%	62,72 %

Berdasarkan table 3.8 di atas tampak bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja berikut :

1. Prosentase tingkat capaian ketersediaan protein perkapita terhadap standard ideal sebesar 107,3 %.
2. Prosentase tingkat capaian konsumsi protein perkapita terhadap standard ideal sebesar 8,92 %
3. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian sebesar 62,72 %

3.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tampak pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Analisis Program Atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1. Program Ketersediaan dan Akses Pangan berhasil mencapai angka rata-rata ketersediaan protein per kapita di Kota Cimahi yaitu sebesar 130 gram/kap/hari atau setara dengan 207,3 % AKP (Angka Kecukupan Protein) . Hal ini seiring dengan peningkatan permintaan protein di pasaran. Demikian juga dengan capaian Konsumsi rata-rata protein per kapita capaiannya melebihi target yaitu 62,1 gram/kap/hari atau setara 108,92 % AKP.	1. Program Ketersediaan dan Akses Pangan untuk angka ketersediaan karbohidrat per kapita per hari tidak mencapai target. Adapun target ketersediaan kalori adalah 2.400 Kkal/kap/hari, sedangkan capaiannya adalah 2.342 Kkal/kap/hari atau setara dengan 97.6%. Hal ini seiring dengan permintaan pasar yang mana masyarakat sudah mulai mengurangi konsumsi karbohidrat. Demikian juga angka rata-rata konsumsi karbohidrat tidak mencapai target, yaitu 98,7% AKE

2. Kegiatan .Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat berhasil mencapai target kestabilan harga pangan dan harga pangan pokok lainnya. Target kenaikan harga/ <i>Coeficient variant</i> (CV) nya untuk beras maksimum 10% sedangkan untuk kenaikan harga bahan pangan pokok lainnya diharapkan kenaikan harga (CP) tidak melebihi 10%. Adapun capaiannya untuk harga beras CV nya rata-rata hanya 1 % sedangkan untuk kenaikan harga pangan pokok lainnya CV mencapai 2 – 5 %. 3. Kegiatan Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan berhasil mendukung program Ketersediaan dan Akses Pangan yang indikatornya adalah Prosentase bahan pangan asal tumbuhan yang aman dikonsumsi yang ditargetkan 60 % tercapai target sebesar 61 %. 4. Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi hasil Pertanian, Peternakan, serta Pengembangan Budidaya Perikanan pada beberapa kegiatan capainnya mendukung keberhasilan program yaitu Produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha) mencapai target yaitu 6,7 Ton/Ha sementara targetnya adalah 6,5 ton/Ha.	2. Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan tidak mencapai target produksi yaitu 757.857 liter atau 94,73% dari yang ditargetkan yaitu 800 liter. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan populasi ternak sebagai akibat kemarau panjang. 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Peternakan/perikanan gagal mencapai target wilayah cakupan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk bisa sampai ke luar Propinsi Jawa Barat. Sementara ini wilayah cakupan masih lingkup Propinsi Jawa Barat saja walaupun
---	--

Keberhasilan ini terutama didukung oleh kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5. Kegiatan Pembinaan & pengembangan perikanan, Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Peningkatan Kapasitas Aparatur Perikanan/Penyuluh Pertanian mendukung pencapaian produksi perikanan budidaya yaitu 335,35 Ton atau 111,78% dari yang ditargetkan yaitu 300 ton 6. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Hias mencapai target yang mana jumlah jenis ikan hias yang dikembangkan sebanyak 4 jenis, yaitu frontosa, platy, gupy, corydoras. Sedangkan target pengembangan hanya 2 jenis. 7. Kegiatan Pendataan Masalah Peternakan mencapai target yang mana rasio antara jumlah populasi ternak yang sakit dengan jumlah ternak sakit yang diobati = 1 : 1 8. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak mendukung target penerimaan PAD dari sector perikanan dan pertanian, yaitu sebesar 29,62% dari Sektor Perikanan dan 35,24% dari sektor pertanian.	
--	--

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tampak pada table 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran

NO	BIDANG/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI (RP)	%
1	BIDANG KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN				
	Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	140.800.000	113.840.000	80,85
	Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	2	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	2.750.000	2.750.000	100
	Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	3	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	71.509.900	62.884.900	87,94
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	4	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan dan Suplai Pangan	53.674.000	52.620.000	98,04
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	5	Penyuluhan sumber pangan alternatif	209.692.000	207.606.750	99,00
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	65.089.000	60.194.500	92,48
	Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	7	Operasional Dewan Ketahanan Pangan	30.903.600	28.050.000	90,76
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	8	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	72.825.000	72.322.000	99,30
			Jumlah	647.243.500	600.268.150	92,74
2	BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				
	Seksi Pertanian	1	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	291.206.000	281.680.600	96,72

	Seksi Pertanian	2	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (BOP Penyuluh)	30.000.000	29.400.000	98,00
			Jumlah	321.206.000	311.080.600	96,84
3	BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN, UPTD PUSKESWAN DAN UPTD BBIAT	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN /PETERNAKAN SERTA PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN				
	Seksi Pertanian	1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	251.198.000	244.035.000	97,15
	UPTD BBIAT	2	Pengembangan bibit ikan unggul	481.738.900	393.014.000	81,58
	Seksi Perikanan	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perikanan/ Penyuluh Pertanian	49.670.000	49.670.000	100
	Seksi Perikanan	4	Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	106.070.000	105.609.500	99,56
	Seksi Peternakan	5	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	73.810.000	72.979.740	98,87
	Seksi Peternakan	6	Pengembangan agribisnis peternakan	177.086.000	167.304.500	94,47
	Seksi Peternakan	7	Pendataan Masalah Peternakan	31.299.000	22.550.000	72,04
	UPTD Puskeswan	8	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	601.800.410	568.141.575	94,40
	Seksi Peternakan	9	Kesehatan Masyarakat Veteriner	133.658.990	118.428.600	88,60
	Seksi Perikanan	10	Pembinaan dan pengembangan perikanan	144.402.000	100.066.000	97,42
	UPTD BBIAT	11	Pengembangan Budidaya Ikan Hias	337.675.000	277.694.000	82,28
			Jumlah	2.388.408.300	2.160.112.915	90,44

		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUK PERTANIAN/PETERNAKAN/ PERIKANAN				
	Seksi Peternakan	1	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	24.584.500	23.599.997	95,99
	Seksi Perikanan	2	Temu Usaha Perikanan	23.080.500	23.061.000	99,91
	Seksi Pertanian	3	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	48.005.500	47.905.500	99,79
			Jumlah	95.670.500	94.566497	98,84
4	SEKRETARIAT	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	127.366.650	126.033.000	98,95
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	123.200.000	111.348.604	90,38
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	Pemyediaan Media Massa, Barang Cetakan dan Penggandaan	52.600.000	50.023.500	95,10
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	410.534.000	379.139.725	92,35
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	126.772.520	126.469.500	99,76
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Penyediaan Gudang Kantor	155.000.000	64.000.000	41,29
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.570.000	54.567.000	99,99
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan ketenagkerjaan	-	-	-
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Pengadaan Seragam Pegawai	-	-	-

	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	58.700.000	51.245.125	87,30
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	11	Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	458.321.343	458.021.343	99,93
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.634.000	78.608.000	98,71
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	13	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas	457.221.265	450.320.000	98,49
			Jumlah	2.103.919.778	1.949.775.797	92,67
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Penyusunan Laporan Inventaris Barang	17.215.000	16.860.000	97,99
	Sub Bagian Program dan Keuangan	2	Penyusunan Standar Pelayanan Operasional dan Prosedur PD	128.559.600	128.394.000	99,87
	Sub Bagian Program dan Keuangan	3	Penyusunan laporan keuangan	10.138.300	9.922.000	97,86
	Sub Bagian Program dan Keuangan	4	Penyusunan Renstra dan Renja PD	72.353.000	71.784.000	99,21
	Sub Bagian Program dan Keuangan	5	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	79.297.000	78.769.250	99,33
			Jumlah	307.562.900	305.729.250	99,40
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA				
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya pegawai	144.333.200	142.280.000	98,57
			Jumlah	144.333.200	142.280.000	98,57
JUMLAH BELANJA LANGSUNG				6.008.344.178	5.563.813.209	92,60

Berdasarkan table 3.9 di atas, serapan anggaran belanja langsung untuk mendukung kegiatan sebesar 92,60. Hal ini terjadi karena efisiensi anggaran sebesar 7,4 %. Dengan demikian terdapat pengembalian anggaran Belanja Langsung ke kas daerah sebesar 7,4 %. Adapun rata-rata serapan anggaran tiap program adalah 95,64 %

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan dan capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan telah disusun sesuai dengan visi dan misi Kota Cimahi, Rancangan Revisi RPJMD Kota Cimahi dan Rancangan Revisi Renstra Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.
2. Sasaran strategis 1, yaitu Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal, dan Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal menunjukkan bahwa secara kuantitatif, ketersediaan pangan di wilayah Kota Cimahi sudah cukup (90 – 110 % dari standar ideal (AKE). Pada aspek kualitatif, penyediaan pangan di Kota Cimahi belum optimal. Penyediaan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula belum memenuhi standar ideal. Adapun kelompok pangan yang telah mencapai ketersediaan ideal ialah kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah.

Rata-rata kuantitas konsumsi pangan Kota Cimahi tahun 2019 berada dalam kategori tahan pangan karena jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energy ideal (90 – 119,9 % AKE). Akan tetapi jika dilihat per kelompok pangan maka dapat dilihat terdapat beberapa kelompok pangan yang konsumsinya masih belum sesuai dengan anjuran ideal. Konsumsi energy kelompok padi-padian tergolong berlebih dari standar. Adapun konsumsi pangan sumber protein nabati masih kurang. Dengan demikian, konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayur dan buah sebaiknya ditingkatkan untuk dapat mencapai masyarakat yang sehat dan produktif.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, secara umum tampak bahwa terjadi peningkatan konsumsi protein, sementara energy cenderung mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan pergeseran pemahaman masyarakat yang semula lebih mengutamakan konsumsi energy (karbohidrat) daripada protein menjadi mengurangi karbohidrat dan memperbanyak protein.

Prosentase ketersediaan energy juga mengalami penurunan dibandingkan dengan prosentase ketersediaan protein. Ketersediaan ini tentu saja dipengaruhi oleh permintaan pasar (konsumsi masyarakat).

3. Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan dengan indikator Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi, Prosentase peningkatan produksi susu, Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya, dan prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor pertanian dan perikanan. Capaian kinerja dari masing-masing indikator ini mengalami peningkatan kecuali produksi susu mengalami sedikit penurunan karena terjadi penurunan populasi sapi perah akibat kemarau panjang.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian prosentase produktivitas hasil tanaman padi, dan prosentase produksi perikanan, Prosentase rata-rata capaian PAD bidang pertanian dan perikanan semuanya mengalami peningkatan, kecuali produksi susu tahun 2019 ini mengalami penurunan karena adanya penurunan populasi ternak sapi perah sebagai akibat kemarau panjang.

4.2 Kendala dan Hambatan

Secara umum kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kerawanan pangan
2. Fluktuasi harga pangan
3. Keanekaragaman dan keamanan pangan
4. Alih fungsi lahan pertanian
5. Tenaga kerja/Wirausaha tani
6. Ketersediaan jaringan irigasi tingkat usaha tani

4.3 Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis capaian kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2019, maka berikut adalah upaya tindak lanjut yang harus dilakukan:

A. Urusan pangan:

1. Guna meningkatkan ketahanan pangan daerah maka perlu lebih intensif kegiatan sosialisasi akan pentingnya keanekaragaman konsumsi pangan dengan menu B2SA melalui kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya pada level kecamatan tetapi juga pada level kelurahan melalui promosi P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan).
2. Kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) harus menjadi isu penting karena daya dongkrak dan pemberdayaan masyarakat yang lebih tinggi untuk meningkatkan gizi dan pendapatan keluarga.
3. Mengefektifkan pemantauan harga pangan pokok dan pangan penting lainnya untuk stabilisasi harga pangan.

4. Berupaya lebih keras dan upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan sosialisasi penggunaan bahan pengawet makanan yang aman untuk dikonsumsi baik untuk kalangan produsen maupun konsumen.
5. Peningkatan stok cadangan pangan untukantisipasi rawan pangan.

B. Urusan Pertanian dan Perikanan

1. Menjamin Lahan pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
2. Mengupayakan tumbuhnya wirausaha tani muda .
3. Penggunaan bibit unggul, penerapan metode teknik bertanam, pemupukan, dan penggunaan alsintan.
4. Pengembangan tanaman lokal.
5. Pengembangan kemitraan untuk petani, peternak, dan pembudidaya ikan untuk memperluas jaringan pemasaran.
6. Pengembangan ikan hias